

## PROSES URBANISASI PERDESAAN DI PROVINSI ACEH

Oleh

**Alamsyah Taher**

Dosen Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah

alam\_fisip@yahoo.com

### ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah, (1) pola-pola urbanisasi (berikut ciri-ciri utamanya dan persoalan-persoalan yang ditimbulkan, apa dan bagaimana yang berkembang di Provinsi Aceh dan kedua tindakan-tindakan kebijakan dan perencanaan pembangunan apa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan urbanisasi perdesaan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima proses yang dapat dikenali dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, mega urbanisasi; *kedua*, tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi; *ketiga*, munculnya banyak kota-kota baru baik sebagai kota otonom maupun kota-kota kabupaten; *keempat*, berkembangnya proses urbanisasi perdesaan pada wilayah koridor-koridor utama di Aceh yang padat penduduk akibat semakin baiknya sarana transportasi dan komunikasi; dan *kelima*, berkembangnya proses migrasi dua arah, yaitu pergerakan penduduk baik dari desa ke kota maupun dari kota ke desa. Proses migrasi dua arah ini sangat intensif terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami proses mega urbanisasi dan urbanisasi perdesaan.

### PENDAHULUAN

Pada akhir milenium yang lalu penduduk dunia telah mencapai 6 milyar jiwa, padahal pada tahun 1950 baru berjumlah 2,5 milyar jiwa. Hal ini berarti 3,5 milyar jiwa ditambahkan ke permukaan bumi ini hanya dalam kurun waktu 50 tahun. Sebagian besar dari kenaikan ini terjadi di negara sedang berkembang, yaitu mencapai lebih dari 3 milyar jiwa, sedang sisanya terjadi di negara maju. Kenaikan jumlah penduduk dunia yang sangat besar ini terjadi seiring dengan proses urbanisasi di sebagian besar negara sedang berkembang.

Sebagai bagian dari negara sedang berkembang, ada empat catatan yang menarik mengenai ledakan penduduk perkotaan di Indonesia. Pertama, seperti halnya di negara sedang berkembang yang lain, ledakan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang resen. Kedua, terjadi. Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat dalam tiga dasawarsa terakhir ini, yaitu munculnya sejumlah besar kota kecil baru yang pada awalnya merupakan daerah perdesaan (Daliyo, 1992). Daerah perdesaan yang mengalami perubahan tersebut terutama yang terletak di sekitar kota-kota besar. Ketiga, konsentrasi dan perkembangan penduduk daerah perkotaan di Indonesia juga menunjukkan gejala ketimpangan. Dari 56 juta jiwa penduduk perkotaan pada tahun 1990, lebih dari 60 persennya terpusat di kota-kota besar (Tjiptoherijanto, 1995). Ketimpangan ini dipertajam dengan semakin tingginya dominasi kota terbesar, Jakarta, dalam sistem perkotaan di Indonesia. Keempat, 70 persen penduduk perkotaan di Indonesia terpusat di Pulau Aceh. Proporsi penduduk perkotaan di Pulau Aceh ini tampaknya akan terus berkembang dengan cepat mengingat tingkat pertumbuhan penduduk kota jauh

lebih tinggi daripada penduduk perdesaan, yaitu 5 persen dibanding 1.2 persen (NUDS,1985; Douglass, 1988).

Distribusi tingkat urbanisasi antar provinsi di Pulau Aceh ternyata menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Laju pertumbuhan proporsi penduduk perkotaan di Provinsi Aceh selama dasawarsa 1990an menunjukkan angka tertinggi, yaitu 22 persen dibanding dengan keempat provinsi lainnya. Tingginya tingkat urbanisasi di Provinsi Aceh ini sangat menarik untuk diperhatikan, mengingat laju dan tingkat urbanisasi yang tinggi sering dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi. Provinsi Aceh bukan merupakan pusat pembangunan ekonomi nasional. Bahkan provinsi ini lebih cocok bila dimasukkan dalam kelompok 'wilayah pinggiran' dalam arena pembangunan ekonomi nasional walaupun propinsi ini terletak di ujung Pulau Sumatera. PDRB per kapita propinsi ini pada tahun 1990 kurang dari seperempat PDRB per kapita DKI Jakarta (Rotge, 2000).

Ada indikasi yang kuat, bahwa proses urbanisasi yang didominasi di wilayah Provinsi Aceh adalah *in situ urbanisation* atau urbanisasi perdesaan, yaitu proses perubahan (transformasi) wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan (Iluisman, 1994; Rotge, 2000; Iluisman dan Kragten, 1997). Ada tiga alasan yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu: pertama, data migrasi netto nasional 1980-1990 menunjukkan, bahwa Provinsi Aceh bersama dua provinsi lainnya di Aceh (yaitu Sumatra Utara dan Sumatra Barat) menunjukkan angka negatif, yang berarti migrasi keluar lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi. Kedua, tingkat pertumbuhan penduduk alami di Provinsi Aceh juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi-propvnsi lainnya di Jawa. Ketiga, perbandingan hasil Sensus Penduduk (SP) 1980, 1990 dan 2000 menunjukkan, bahwa banyak wilayah perdesaan yang berubah menjadi wilayah perkotaan.

Penelitian ini adalah tentang urbanisasi perdesaan. Urbanisasi perdesaan bukan persoalan perubahan struktur demografi semata, namun menyangkut perubahan lain seperti peningkatan infrastruktur, perubahan pola dan jenis penggunaan lahan, dan bahkan menyangkut pula perubahan struktur sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian empiris pada tingkat mikro dan makro yang telah dilakukan sebelumnya memang menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan yang cukup besar di daerah perdesaan di Aceh terutama dalam tiga dasawarsa terakhir.

Ada dua jenis perubahan yang paling banyak dibahas secara terpisah dalam penelitian sebelumnya, yaitu pertama, diversifikasi ekonomi perdesaan: ekonomi rumah tangga perdesaan tidak lagi jadi sepenuhnya tergantung pada satu sektor ekonomi saja (terutama sektor pertanian), namun telah berkembang keberbagai sektor non-pertanian baik pada tingkat rumah tangga maupun tingkat wilayah (lihat Hart, 1980,; Harris, 1991; Rotge, et al, 1995), dan kedua, adalah perubahan fisik-keruangan daerah I perdesaan akibat dari perluasan pengaruh kota (terutama kota-kota besar), peningkatan infrastruktur dan perubahan pola penggunaan lahan (lihat McGee, 1987, 1991, 1994; Douglas, 1988; Firman, 1992, 1996; Firman dan Dharmapatni, 1994; Ginsburg, 1991). Dalam penelitian ini, urbanisasi perdesaan yang berlangsung di Provinsi Aceh dikaji secara terpadu dalam arti kajian makro (berkaitan dengan proses urbanisasi pada skala nasional) dan mikro (berkaitan dengan proses urbanisasi pada level rumah tangga) merupakan satu kesatuan kajian. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang proses urbanisasi perdesaan.

Dengan melihat kenyataan bahwa tingkat urbanisasi di wilayah Provinsi Aceh yang tinggi justru terjadi pada tingkat pembangunan ekonomi wilayah yang rendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, maka ada dua permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam penelitian, yaitu (1) pola-pola urbanisasi (berikut ciri-ciri utamanya dan persoalan-persoalan yang ditimbulkan, apa dan bagaimana yang berkembang di Provinsi Aceh dan kedua tindakan-tindakan kebijakan dan perencanaan pembangunan apa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan urbanisasi perdesaan di Provinsi Aceh.

Konseptualisasi urbanisasi dan urbanisasi perdesaan, urbanisasi adalah proses pengkotaan, dalam arti tumbuh dan berkembangnya sifat-sifat kekotaan pada suatu wilayah (dan penduduknya). Proses pengkotaan ini berdimensi jamak dan sangat kompleks. Urbanisasi tidak hanya bersangkutan dengan pergerakan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan atau dari kota yang satu ke kota yang lain, namun juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi perkotaan, perubahan sistem sosial dan politik, serta perubahan struktur bentang-lahannya (Lihat Jones, 1979; Bintarto, 1983; Chadwick, 1987; Roberts, 1978, 1995; Gugler, 1996; UNHABITAT, 2002).

Selain sifat berdimensi jamak, munculnya anka interpretasi urbanisasi lebih banyak disebabkan oleh ketidak-sempumaan pemahaman tentang *urban* (perkotaan) im sendiri. Perbedaan-perbedaan yang muncul secara umum berkisar pada tiga hal pokok, yakni: (1). bagaimana konsep perkotaan baik secara fisik, sosial, maupun fungsional im dibatasi; (2). bagaimana caranya membedakan daerah perkotaan dan daerah perdesaan; dan, (3). bagaimana interpretasi tentang perbedaan kota dan desa, yaitu sebagai fenomena yang mungkin dipandang sebagai 'masalah yang harus diselesaikan' oleh sebagian (besar) kelompok masyarakat. Hasil penyelesaian masalah (baik yang diharapkan maupun tidak) melalui mekanisme kebijakan dan perencanaan baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika proses perubahan yang kemudian menggerakkan kembali keseluruhan proses urbanisasi (Knox, 1994).

Dengan memperhatikan cakupan studi urbanisasi seperti tersebut di atas, maka studi urbanisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studi yang menitik-beratkan perhatiannya terhadap proses perubahan (ekonomi, demografi, politik, sosial, teknologi, dan fisik-keruangan) yang mengarah pada pembentukan ciri-ciri struktural kekotaan baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Proses-proses perubahan ini dipandang sebagai akibat atau hasil dari hubungan timbal-balik antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian, sifat dinamis dari sistem perkotaan, bentuk perkotaan, ekologi perkotaan, dan urbanisme juga dihasilkan dari hubungan umpan-balik tersebut. Di samping itu, studi urbanisasi juga memperlihatkan pengaruh faktor setempat di dalam memodifikasi proses perubahan yang bersifat umum, serta memperhatikan penganali balik pengambilan keputusan (tercermin dalam kebijakan dan perencanaan) terhadap proses urbanisasi.

Oleh karena proses perubahan yang berkaitan dengan fenomena urbanisasi dapat terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan, maka hal terpenting dalam studi urbanisasi adalah menentukan jenis permukiman penduduk yang mana yang dapat dikategorikan sebagai daerah

perkotaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa urbanisasi dapat dipahami sebagai proses “*of ceasing to be rural*”, maka daerah perkotaan dalam perspektif ini dapat diinterpretasikan ganda, yaitu daerah perkotaan yang secara definitif ditetapkan sebagai kota (baik secara administratif maupun aspek legal lainnya) dan daerah perkotaan yang sebelumnya merupakan daerah perdesaan.

Dimasukkannya daerah yang sebelumnya merupakan daerah perdesaan ke dalam studi urbanisasi mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena mencerminkan sifat dinamis dari proses urbanisasi itu sendiri. Proses perubahan (terutama yang disebabkan oleh pemusatan penduduk, pemusatan kegiatan dan fungsi ekonomi, serta pemusatan kegiatan pembangunan lainnya) yang terjadi di daerah perkotaan akan mendorong lebih banyak penduduk dari daerah belakangnya (*hinterlands*) untuk tunc berperan serta dalam kegiatan kekotaan. Keikut-sertaan dalam proses ini, seperti migrasi dari desa ke kota, atau bentuk-bentuk interaksi desa-kota lainnya, seperti kegiatan-kegiatan pemasaran, distribusi, pendidikan, dan sebagainya, akan mempengaruhi daerah perdesaan yang pada akhirnya, lambat atau cepat, daerah belakang ini akan terkotakan. Dengan landasan pemikiran ini maka studi urbanisasi dapat dipecah menjadi dua bagian utama berdasarkan orientasi geografis kajiannya, yaitu studi urbanisasi yang lebih mengkonsentrasikan kajiannya terhadap proses-proses perubahan yang terjadi di dalam kota dan studi urbanisasi yang mengkaji proses-proses perubahan yang terjadi di luar kota. Penelitian ini cenderung memposisikan diri pada bagian yang kedua oleh karena studi urbanisasi perdesaan lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di daerah perdesaan akibat proses urbanisasi.

Oleh beberapa pakar urbanisasi negara sedang berkembang, proses urbanisasi di wilayah ini Provinsi Aceh kini menghasilkan ‘cetakan-ruang’ yang berbeda bila dibandingkan dengan pengalaman yang terjadi di negara maju, khususnya untuk wilayah padat penduduk di Asia, seperti Cina, India, Indonesia, Taiwan, Thailand (lihat McGee, 1971, 1987, 1991, 1994; Douglass, 1988, 1996; Ginsburg, 1991; Firman, 1992, 1994, 1996; Hugo, 1906). Pola urbanisasi demikian ini menimbulkan apa yang dikenal dengan “**sisi lain**” dari urbanisasi, yaitu urbanisasi yang dicirikan dengan pertumbuhan wilayah pinggiran kota (*peri-urban*); pertumbuhan koridor yang menghubungkan dua kota besar yang sangat cepat; hubungan dan keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan yang sangat kuat; dan peleburan kegiatan perdesaan dan perkotaan.

Hasil dari ‘sisi lain’ proses urbanisasi di wilayah Asia padat penduduk (terutama di negara-negara yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi) adalah batas antara perdesaan dan perkotaan, baik dalam perspektif fisik-keruangan maupun sosial-budaya dan ekonomi yang semakin kabur. Proses ini paling tidak mempunyai dua dampak, yaitu reorientasi atau modifikasi teori-teori terdahulu tentang “*a sustained rural-urban transformation*” dan diragukannya efektivitas kebijakan pembangunan yang didasarkan pada dikotomi perdesaan-perkotaan. Untuk menjembatani hal-hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, proses-proses perubahan yang terjadi di luar ‘batas’ kota (dalam arti secara definitif, legal administratif) yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai kekotaan disebut urbanisasi perdesaan. Dari hasil pembahasan sebelumnya, urbanisasi perdesaan mempunyai paling tidak tiga arti, yaitu:

1. Urbanisasi ‘in situ’ suatu daerah (atau masyarakat) perdesaan;

2. Perubahan struktur ekonomi, sosial, demografi, dan fisik-keruangan di daerah perdesaan dari yang bersifat kedesaan menuju kekotaan; dan
3. Tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan, fasilitas-fasilitas, dan penduduk atau masyarakat yang berbasis perkotaan di daerah (sebelumnya) perdesaan.

Dalam kerangka pengertian tersebut, maka konsep urbanisasi perdesaan mencakup proses-proses perubahan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan baik internal maupun eksternal; proses urbanisasi 'in situ' dan proses sub-urbanisasi; serta proses urbanisasi yang berkembang pada suatu daerah yang menghubungkan permukiman perdesaan dengan sistem perkotaan wilayah. yaitu daerah perdesaan yang berada di koridor antara dua kota besar atau lebih dan pusat pelayanan daerah perdesaan di batas bawah suatu hirarki perkotaan.

Keterlibatan geografiwan dalam studi urbanisasi negara sedang berkembang cukup signifikan baik dalam kelompok modernisasi, dependensia maupun kelompok interdependensia. Ini membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara ilmu geografi dengan perkembangan studi urbanisasi. Geografi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena di permukaan bumi dalam perspektif keruangan. Pernyataan ini secara implisit paling tidak menyebut dua hal pokok, pertama bahwa fenomena dan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya setiap fenomena yang berada atau terjadi dalam ruang merupakan obyek pengamatan geografis. Itulah sebabnya ilmu geografi termasuk dalam ilmu pengetahuan yang bersifat umum (seperti halnya ilmu sejarah) yang tidak mempunyai obyek material secara khusus. Hal ini tercermin dari banyaknya cabang-cabang ilmu yang timbul dari batang-tubuh ilmu geografi, dimana masing-masing cabang ilmu tampak berdiri sendiri dengan minat masing-masing terhadap fenomena tertentu. Kedua, perspektif keruangan dalam ilmu geografi diwujudkan dalam bentuk sifat analisis dan pentingnya peranan skala dalam berbagai tingkatan pengamatan dan analisis. Ada empat jenis analisis keruangan yang sering dilakukan dalam setiap kajian geografis, yaitu: (1) lokasi dan distribusi; (2) interaksi, relasi, interdependensi; (3) pola, struktur, organisasi; dan, (4) analisis proses keruangan.

Dalam setiap analisis secara inheren tercermin skala pengamatan yang dilakukan. Dalam ilmu geografi, peran skala tidak bersifat statis namun sangat dinamis dimana hubungan antar tingkat skala pengamatan (makro-meso-mikro) juga mendapatkan perhatian yang sangat penting. Urbanisasi, misalnya, bisa dipandang sebagai fenomena yang bersifat global (skala makro), namun urbanisasi juga dapat dilihat pada tingkat komunitas (skala mikro). Dalam analisis geografis, fenomena urbanisasi merupakan kontinum peristiwa dari tingkat komunitas hingga tingkat global.

Di samping itu, dinamika permukiman (perdesaan dan perkotaan) di suatu wilayah tidak terjadi dalam lingkungan kosong. Intervensi pengambilan keputusan juga merupakan kekuatan yang sangat menentukan kinerja kekuatan-kekuatan interaksi dan faktor lokal. Dengan demikian, dinamika permukiman merupakan hasil kerja dari kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berinteraksi dan pengaruh-mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuatan-kekuatan yang bekerja dapat dimasukkan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu (1) faktor-faktor setempat yang mencakup aspek ekologi, potensi sumberdaya dasar wilayah dan aspek keruangan; (2) interaksi, yaitu hubungan-hubungan baik di dalam

maupun dengan wilayah lain yang dicerminkan dengan aliran modal, barang, manusia, dan informasi; dan (3) intervensi pengambilan keputusan. Hubungan kedua kekuatan tersebut dengan dinamika permukiman di suatu wilayah dapat divisualisasikan.

## **METODE PENELITIAN**

Kerangka teori penelitian ini mengisyaratkan bahwa kajian tentang urbanisasi perdesaan memerlukan beberapa tingkat pengamatan dalam analisisnya. Di samping itu, tingkat analisis yang berbeda akan membawa konsekuensi pemilihan metode dan skala data yang berbeda. Secara garis besar, analisis yang akan dilakukan dapat dibagi dalam tiga tingkatan: makro, meso, dan tingkat mikro. Penggabungan beberapa tingkat analisis dalam satu kajian atau penelitian menegaskan, bahwa penelitian proses urbanisasi perdesaan di PROVINSI ACEH mengikuti pendekatan analisis multi-tingkat (*multi-level analysis*). Pendekatan ini mempunyai arti bahwa kajian pada tingkat yang lebih rendah hanya dapat dilakukan setelah hasil kajian pada tingkat yang lebih tinggi diperoleh. Dengan demikian analisis urbanisasi perdesaan di Provinsi Aceh dalam penelitian ini diawali dengan analisis urbanisasi di Indonesia pada umumnya sebagai analisis tingkat makro, yang kemudian disusul dengan analisis urbanisasi tingkat Provinsi Aceh sebagai analisis tingkat meso dan analisis urbanisasi tingkat desa (empat desa terpilih).

## **HASIL PENELITIAN**

Pada masa pra kolonial, proses urbanisasi berkaitan dengan pembentukan pusat-pusat kerajaan besar dan kecil di wilayah nusantara. Ada dua jenis permukiman perkotaan yang terbentuk pada masa ini, yaitu kota suci untuk kota-kota yang berkembang di bagian pedalaman pulau-pulau besar dan kota dagang yang berkembang di bagian pantai atau muara-muara sungai besar. Pola hubungan intersuler yang bersifat otonom antar kota (antar kesultanan atau kerajaan) merupakan kenampakan yang dominan pada masa ini. Pola hubungan semacam ini berubah menjadi hubungan dependensi dengan masuknya kekuatan kolonial, sehingga pada masa kolonial berkembang sebuah struktur perkotaan yang disebut dengan sistein perkotaan kolonial. Sistem perkotaan inilali vang menjadi dasar sistem perkotaan Indonesia hingga awal abad ke-20.

Proses urbanisasi yang dominan terjadi di wilayah Provinsi Aceh selama kurun waktu 1980-2000 adalah proses urbanisasi perdesaan. Proses ini ditandai dengan penurunan jumlah penduduk Kota di Aceh baik secara relatif maupun absolut, adanya reklasifikasi status permukiman di satuan pemukiman sekitar Kota Di Aceh dari desa *rural* menjadi desa *urban*, *clan* berubahnya satuan-satuan permukiman yang bersifat kedesaan menjadi permukiman bersifat kekotaan sebagai akibat dari berkembangnya aspek perkotaan di permukiman yang bersangkutan. Distribusi penduduk perkotaan di Provinsi Aceh tidak merata dan cenderung mengelompok pada wilayah dengan ketinggian 0 hingga 300 MDPL. Hal ini ditunjukkan dengan '*share*' negatif jumlah penduduk Kota di Aceh dan penurunan proporsi penduduk perdesaan di dua kabupaten tersebut yang cukup signifikan.

Pola distribusi keruangan permukiman secara umum bersifat konsentris, yaitu dengan bentuk permukiman perkotaan dikelilingi oleh permukiman perdesaan di sekitarnya. Ter-

bentuknya pola konsentris ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Provinsi Aceh. Sesuai dengan kondisi fisiografi wilayah, distribusi pola konsentris ini dapat dijumpai di tiga bagian wilayah, yaitu wilayah barat, tengah, dan wilayah timur.

Proses urbanisasi perdesaan ini bersifat konsentratif dan difusif. Konsentratif dalam arti perkembangan wilayah tengah jauh lebih tinggi daripada wilayah barat dan wilayah timur. Difusif dalam arti derajat kekotaan suatu permukiman semakin rendah dengan semakin jauhnya lokasi permukiman yang bersangkutan dengan pusat kota. Secara umum proses urbanisasi perdesaan di wilayah Provinsi Aceh dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor tingkat kemakmuran wilayah, tingkat kemakmuran penduduk, geografis, dan faktor sarana komunikasi dan informasi. Kuatnya pengaruh dari dua faktor tersebut pertama menunjukkan bahwa pengaruh yang sangat kuat dari dinamika perekonomian wilayah terhadap proses urbanisasi perdesaan. Sektor ekonomi yang sangat berpengaruh tersebut adalah usaha kecil dan menengah dan informal (terutama dari sektor jasa).

Permukiman di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis permukiman, yaitu permukiman perkotaan (A), permukiman desa-kota (B), dan permukiman perdesaan (C). Permukiman perkotaan terbagi ke dalam lima jenis permukiman yang dapat disebut sebagai kota, yaitu kota inti (A1), kota satelit (A2), kota kabupaten (A3), kota kecamatan (A4), dan pusat perdesaan (A5); untuk permukiman desa-kota dapat dibedakan ke dalam dua kelompok permukiman, yaitu desa-kota pinggiran (B1), desa-kota pedalaman (B2), dan desa-kota koridor (B3). Dan terakhir adalah permukiman perdesaan, dimana permukiman ini dapat dikelompokkan menjadi menjadi dua, yaitu: desa padat penduduk (C1) dan desa jarang penduduk (C2).

Kondisi sosial-ekonomi di setiap jenis permukiman desa-kota adalah unik. Namun demikian, ada perbedaan yang sangat menyolok antara permukiman desa-kota yang dekat dengan permukiman desa-kota yang relatif jauh dari Kota Di Aceh. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama terdapat dalam hal yang berkaitan dengan aspek-aspek demografi rumah tangga, struktur produksi dan sumber penghasilan rumah tangga, pola konsumsi rumah tangga, pola mobilitas, dan kondisi bangunan tempat tinggal.

Pola produksi yang tercermin dalam sumber-sumber pendapatan rumah tangga di keempat desa penelitian menunjukkan keanekaragaman, tidak tergantung pada satu jenis kegiatan ekonomi, baik untuk tingkat desa maupun di dalam satu rumah tangga. Terdapat perbedaan yang tegas antara dua kelompok desa penelitian atas berdasarkan besarnya sumber pendapatan tertentu terhadap pendapatan total. Peranan kegiatan pertanian dalam ekonomi rumah tangga.

Semakin tinggi derajat kekotaan suatu wilayah desa-kota, semakin tinggi proporsi rumah tangga yang tinggal dalam bangunan lebih baik. Penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi untuk memasak masih merupakan sifat yang tampak nyata di wilayah desa-kota di Aceh. fungsi ganda rumah tinggal juga merupakan sifat penting lain dari wilayah desa-kota (terutama pada wilayah desa-kota dengan derajat kekotaan yang tinggi). Jenis usaha yang dikembangkan tergantung pada kegiatan ekonomi yang menonjol di daerah masing-masing. fungsi ganda rumah tinggal juga membuktikan bahwa banyak jenis kegiatan non-pertanian di wilayah desa-kota merupakan kegiatan *in situ*.

Secara umum dampak krisis ekonomi mulai terasa di semua daerah penelitian enam bulan kemudian semenjak terjadinya “kepanikan” pada tingkat nasional. Hampir semua desa mengalami kelangkaan barang dan uang, dan suasana ketidakpastian yang sangat dalam. Perubahan diet masyarakat (menuju ke tingkat yang lebih rendah tentunya) dan tindak kriminal (pencurian, perampokan, dan penjarahan hutan) merupakan pemandangan umum. Ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah membawa suasana ‘stres’ dan ‘panik’ masyarakat menjadi lebih terasa. Keadaan ini berlangsung hingga enam bulan berikutnya, hingga terpilihnya presiden baru secara demokratis. Namun demikian, ketenangan dalam masyarakat akibat dari kestabilan politik ini belum bisa membawa masyarakat di daerah penelitian ke taraf keadaan sebelum krisis. Kondisi ‘*shock dan stress*’ memang terjadi di daerah penelitian, namun keadaan ini terjadi pada awal krisis hingga dua tahun berikutnya. Setelah itu, sebagian besar masyarakat tidak lagi ‘menganggapnya’ sebagai krisis (yang berakibat pada kepanikan dan keresahan) dan sudah terbiasa kembali dengan pola penghidupan ‘seperti sekarang ini’. Pola penghidupan ‘seperti sekarang ini’ yang dimaksud adalah tingginya biaya kehidupan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum krisis, mahalnnya harga *input* dan naiknya upah buruh.

Terdapat perbedaan-perbedaan dampak terhadap strategi penghidupan yang cukup signifikan antar desa dan antar lapisan masyarakat. Adaptasi keadaan yang paling menonjol adalah pendayagunaan ‘sumberdaya lokal’ sebagai sumber penghasilan dan bertahan hidup. Masyarakat desa-kota di pinggiran kota lebih memilih lahan pekarangan sebagai pusat kegiatan jasa seperti rumah sewa/kos, warung/toko, atau kegiatan-kegiatan jasa yang lain. Di samping itu, telah berkembang pula ‘*multi-spatial bouse-holds*’. Sedangkan untuk masyarakat desa-kota yang jauh dari kota lebih banyak menggunakan lahan pekarangan sebagai sumber diet harian dan tabungan *in natura* (dalam bentuk ternak atau yang lainnya) guna keperluan mendadak atau jangka panjang.

## PENUTUP

Paket kebijakan deregulasi pemerintah pusat pada pertengahan dasawarsa 1980an dan perkembangan sistem keuangan dunia dan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi berdampak cukup signifikan bagi perubahan proses urbanisasi di Indonesia. Ada lima proses yang dapat dikenali dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, mega urbanisasi; *kedua*, tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi; *ketiga*, munculnya banyak kota-kota baru baik sebagai kota otonom maupun kota-kota kabupaten; *keempat*, berkembangnya proses urbanisasi perdesaan pada wilayah koridor-koridor utama di Aceh yang padat penduduk akibat semakin baiknya sarana transportasi dan komunikasi; dan *kelima*, berkembangnya proses migrasi dua arah, yaitu pergerakan penduduk baik dari desa ke kota maupun dari kota ke desa. Proses migrasi dua arah ini sangat intensif terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami proses mega urbanisasi dan urbanisasi perdesaan.

Proses urbanisasi perdesaan di wilayah propinsi Aceh menunjukkan dinamika keruangan yang sangat signifikan dalam aspek kependudukan dan aspek permukiman. Secara umum, proses urbanisasi perdesaan menghasilkan tiga kelompok besar permukiman, yaitu permukiman perkotaan, permukiman perdesaan yang terkotak-an, atau sering disebut dengan



permukiman desa-kota, dan permukiman perdesaan. Pola distribusi keruangan permukiman secara umum bersifat konsentris, yaitu permukiman perkotaan dikelilingi oleh permukiman perdesaan di sekitarnya. Terbentuknya pola konsentris ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fisiografi wilayah. Distribusi pola konsentris ini dijumpai di tiga bagian wilayah, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur.

Secara umum proses urbanisasi perdesaan di wilayah Provinsi Aceh dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor kemakmuran wilayah, tingkat kemakmuran penduduk geografis, dan faktor sarana komunikasi dan informasi. Kuatnya pengaruh dari dua faktor tersebut pertama menunjukkan bahwa pengaruh yang sangat kuat dari dinamika perekonomian wilayah terhadap proses urbanisasi perdesaan, terutama dinamika usaha kecil/menengah dan informal (terutama dari sektor jasa) daripada usaha besar di bidang industri pengolahan dan lainnya.

Kondisi sosial-ekonomi di setiap jenis pemukiman desa-kota adalah unik. Namun demikian, ada perbedaan yang mencolok antara permukiman desa-kota yang dekat dengan permukiman desa-kota yang relatif jauh dari kota di Aceh. Perbedaan-perbedaan tersebut terutama terdapat pada aspek demografi rumah tangga, struktur produksi dan sumber penghasilan rumah tangga, pola konsumsi rumah tangga, pola mobilitas, dan kondisi bangunan rumah tinggal. Di samping itu, terdapat perbedaan-perbedaan dampak **lexis** is terhadap strategi penghidupan yang cukup signifikan antar permukiman desa-kota di daerah penelitian. Masyarakat desa-kota yang dekat dengan kota tampaknya lebih mudah beradaptasi dengan keadaan krisis daripada masyarakat yang jauh dari kota. Adaptasi yang paling menonjol adalah pendayagunaan sumberdaya lokal sebagai sumber penghasilan dan bertahan hidup. Masyarakat desa-kota di pinggiran kota lebih memilih lahan pekarangan sebagai pusat kegiatan jasa seperti rumah sewa/kos, warung/toko, atau kegiatan-kegiatan jasa lainnya. Untuk masyarakat desa-kota yang jauh dari kota lebih banyak menggunakan lahan pekarangan sebagai sumber diet harian dan tabungan *in natura* (dalam bentuk ternak atau lainnya) guna keperluan mendadak atau jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. 1977. *Pengantar Geografi Kota*. Di Aceh: U.P. Spring.
- Cadwallader, M. 1996. *Urban Geography: An Analytical Approach*. London: Prentice-Hall, Inc.
- Carter, I I. 1990. *Urban and Rural Settlements*. New York: Longman Inc.
- Daliyo. 1992. Pola Pertumbuhan Perkotaan dan Perbedaan Angka Pertumbuhan Kota-kota di Indonesia. *Buletin PPT-UPI*. jilid III (2). Maret. 1992.
- Firman, T. 1992. The Spatial Pattern of Urban Population Growth in Java, 1980-1990. in ESCAP (1992). *Migration and Urbanisation in Asia and The Pasifics: Inter-relationships with Socio-economic Development and Evolving Polity Issues*. New York: United Nation.
- Firman, T. 1996. Urban Development in Bandung Metropolitan Region: A Transformation to A Desa-kota Region. *Third World Planning Review*. Vol. 18 (1). pp. 1-21.

- Firman, T. and Dharmapatni, L.A.I. 1994. *The P. merge tics of Extended Metropolitan Regions in Indonesia: The Case of jabotabek and Bandung Metropolitan Area*, presented in The Fourth Asian Urbanization Conference. Taipei: 1-5 January 1994.
- Friedmann, J. and Douglas, M. (1978). Agropolitan Development: towards a new strategy for regional planning in Asia, in Lo, F.C. and Salih, I<. (eds.). *Growth Pole Strategy and Regional Development Policy: Asian Experience an Alternative Approaches*. Oxford: Pergamon.
- Gilbert, A. and Gugler, }. 1982, 1992. *Cities, Poverty, and Development: Urbanisation in The Developing World*. Oxford: Oxford University Press.
- Ginsburg, N. 1991. Extended Metropolitan Regions in Asia: A New Spadal Paradigm, pp. 27-46. in Ginsburg, N., Koppcl, B., and McGee, T.G. (eds). 1991. *The extended Metropolis: Settlement Transition in Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Gugler, J. (eds.). 1996. *The Urban Transformation of the Developing World*. New York: Oxford University Press.
- Gugler, J. (eds.). 1997. *Cities in the Developing World: issues, Theories,-gnd Polity*. New York: Oxford University Press.
- Harris, John. 1991. Agriculture/Non-Agriculture Linkages and Diversificadon of Rural Economic Activity: A South Indian Case Study, pp. 429-457. in Breman, Jan and Sudipto Mundle (Editors). 1991. *Rural Transformation in Asia*. New Delhi: Oxford University Press.
- Hinderink, J. and Titus, M. 1989. Views on The Roles of Small Centres in Regional Development: A Critical Assessment. *The Indonesian journal of Geography*. Vol. 19 (57). pp. 1-14. June 1989.
- Hinderink, J. 1997. Small Town, Rig Dreams? in Naerssen, l'. van, Rutten, M, and Zoomers, A. (eds.). 1997. *The Diversity of Development*. Asseiv. Van Gorcum and Comp. B.V.
- Hoselitz, Bert. 1960. *Sociological Aspects of Economic Growth*. New York: Free PreSvS.
- Hugo, G. 1992. Migration and Rural-Urban Linkages in The ESCAP Region, in ESCAP (1992). *Migration and Urbanisation in Asia and The Pasijics: Inter-relationships with Socio-economic Development and Evolving Polity Issues*. New York: United Nation.
- Hugo, G. 1996. Urbanization in Indonesia: City and Countryside Linked, in Gugler, J. (eds.). 1996. *The Urban Transformation of the Developing World*. New York: Oxford University Press.